

KK  
KKB  
959.802  
HUS  
K



LAPORAN PENELITIAN  
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2003

## KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP ISLAM DI JAWA TIMUR, 1942-1945



\*017004141\*

Peneliti:

Sarkawi B. Husain, S.S., M.Hum.  
Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum.



017004141

### LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PG/2003

Tanggal 13 Juni 2003

Nomor Urut 55

FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nopember, 2003



# LEMBAGA PENELITIAN

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Judul Penelitian               | : | Kebijakan Jepang Terhadap Islam Di Jawa Timur, 1942-1945  |
| a. Macam Penelitian               | : | <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan |
| b. Kategori Penelitian            | : | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III                         |
| 2. Kepala Poyek Penelitian        | : |   |
| a. Nama lengkap dan Gelar         | : | Sarkawi B. Husain, S.S.,M.Hum.  |
| b. Jenis kelamin                  | : | Laki-Laki   |
| c. Pangkat/Golongan dan NIP       | : | Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) 132 234 723   |
| d. Jabatan Sekarang               | : | Staf Pengajar   |
| e. Fakultas/Puslit/Jurusan        | : | Sastra  |
| f. Univ/Ins./Akademi              | : | Universitas Airlangga   |
| g. Bidang Ilmu yang diteliti      | : | Sejarah   |
| 3. Jumlah Tim Peneliti            | : | 2 (dua) orang   |
| 4. Lokasi Penelitian              | : | Surabaya  |
| 5. Kerjasama dengan Instansi lain | : |   |
| a. Nama Instansi                  | : | -   |
| b. A l a m a t                    | : | -   |
| 6. Jangka waktu penelitian        | : | 5 (lima) bulan  |
| 7. Biaya yang diperlukan          | : | Rp. 3.500.000,00  |
| 8. Seminar Hasil Penelitian       | : |   |
| a. Dilaksanakan Tanggal           | : | 10 Nopember 2003  |
| b. Hasil Penelitian               | : | ( ) Baik Sekali                      (V) Baik<br>( ) S e d a n g                      ( ) K u r a n g       |

Surabaya, 10 Nopember 2003



Mengetahui/Mengesahkan  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP 130 701 125

**RINGKASAN**  
**KEBIJAKAN JEPANG TERHADAP ISLAM**  
**DI JAWA TIMUR, 1942 – 1945**

Oleh:

Sarkawi B. Husain, S.S., M.Hum.  
Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum.

Penelitian tentang Kebijakan Jepang Terhadap Islam di Jawa Timur, 1942-1945 ini bermaksud untuk mengetahui perubahan kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda ke pemerintah Pendudukan Jepang. Adapun fokus persoalannya adalah *pertama*, bagaimana politik Belanda terhadap Islam di masa akhir-akhir penjajahannya? *Kedua*, bagaimana proses masuknya Jepang di Jawa Timur? *Ketiga*, perubahan-perubahan kebijakan apa yang dilakukan terhadap Islam? dan *keempat*, usaha apa yang dilakukan Jepang untuk merebut simpati umat Islam.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan orang yang mengalami langsung periode ini dan melalui penelusuran sumber-sumber tercetak, baik berupa majalah maupun sumber pustaka lainnya. Setelah melewati proses seleksi dan verifikasi, data yang ada dianalisis untuk menghasilkan suatu kajian yang bersifat deskriptif-analitis.

Dekade-dekade terakhir dari kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di negeri ini ditandai dengan keluarnya berbagai aturan yang bertujuan mengontrol berbagai aktivitas masyarakat (baca: umat Islam). Aturan atau kebijakan tersebut antara lain: *Pertama*, *pilgrims ordonantie* (ordonansi haji) yang dikeluarkan pada tahun 1927 dan 1932 dan bertujuan untuk mengontrol ketat jamaah haji. *Kedua*,

ordonansi guru yang dikeluarkan pada tahun 1905 dan 1925 yang mewajibkan guru-guru pesantren, muballigh, dan juru dakwah Muhammadiyah membuat laporan tentang tujuan pembelajaran agama pada orang-orang yang bukan keluarga dekatnya. *Ketiga*, menjelang akhir kekuasaannya di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan yang semakin menindas berupa penangkapan pemimpin-pemimpin politik yang beraliran dan bereaksi terlalu keras terhadap penjajahan Belanda.

Ketika kekuasaan Belanda tumbang dan digantikan oleh pendudukan Jepang (1942-1945) Islam dan ummatnya tetap menjadi perhatian penting yang terlalu sulit ditinggalkan oleh Jepang. Kebijakan terhadap Islam yang semula sangat keras dan bersifat memaksa lambat laun melunak dan mencoba menjadi sahabat yang baik.

Pemerintah pendudukan Jepang semula sangat alergi terhadap pemimpin Islam. Oleh karena itu, ulama-ulama seperti K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Macfudz Shiddiq ditangkap dan dipenjarakan untuk mengurangi pengaruh mereka. Namun demikian, beberapa waktu kemudian kebijakan ini mulai berubah dan mulai berusaha merebut simpati umat Islam. Kebijakan untuk melakukan *saikeirei* misalnya, mulai diperlunak dan berusaha untuk menarik ulama kedalam frame kekuasaannya. Dengan demikian, yang tampak kemudian adalah – meminjam istilah Ahmad Mansyur Suryanegara (seorang sejarawan dari Bandung) – *Nippon's Islamic Grass Roots Policy*, yaitu kebijakan politik Jepang untuk kalangan rakyat jelata Islam dengan sasarannya adalah pesantren.

Kata Kunci: Kebijakan Jepang, Islam, Jawa Timur.

Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Airlangga

No. Kontrak: 656/J03.2/PG/2003

## KATA PENGANTAR

Pergantian kekuasaan oleh Jepang pada tahun 1942 telah membukakan mata orang Jawa dan membangunkan dari tidurnya yang panjang. Selama masa kolonial, yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya, rakyat pribumi dibelenggu oleh mimpi-mimpi kebebasan yang tak kunjung tercapai. Pada masa Jepang, masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Timur merasakan dekatnya sebuah kebebasan dengan menyandarkan pada ramalan Jayabaya.

Di sisi lain, pemerintah Jepang benar-benar mengubah tatanan kehidupan sosial masyarakat. Jepang mengubah peranan priyayi yang semula menjadi sentral kekuasaan di berbagai tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara tiba-tiba dibalik dengan menempatkan kyai dan ulama pada posisi yang penting. Pemerintah Jepang bertujuan untuk menarik simpati massa yang secara hirarkis tunduk pada kyai. Dalam bidang pemerintahan, Jepang juga melakukan perombakan-perombakan dalam birokrasi dan yang paling mengesankan adalah mengorganisir masyarakat melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sedangkan semangat perjuangan ditanamkan melalui latihan-latihan kemiliteran

Ketika Jepang mampu mengalahkan pihak Belanda (sekutu) reaksi masyarakat sangat beragam, tetapi pada saat Jepang menang ada secercah harapan yang ditujukan terhadap Jepang ditambah lagi oleh kemampuannya mempropagandakan gerakan 3A. Seiring dengan berjalannya waktu, seluruh elemen masyarakat tampaknya mulai merasakan bahwa pemerintah Jepang lebih berat dibandingkan dengan Belanda.

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana perubahan kebijakan terhadap Islam dan bagaimana kyai ditempatkan dalam struktur sosial yang lebih tinggi,

serta bagaimana kyai “dikurung” keyakinan keagamaannya dalam frame yang dibuat Jepang. Berani kontra dengan Jepang berarti sikap anti-Jepang.

Peneliti menyadari bahwa apa yang tersaji sekarang ini sifatnya masih sederhana, yang tentunya masih membutuhkan penelitian yang lebih dalam dan intensif. Peneliti menyadari bahwa selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena, peneliti sepatutnya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah menyetujui penelitian ini;
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga yang memberi persetujuan dan mengusahakan dana penelitian;
3. Para pegawai perpustakaan Bappeda Propinsi Jawa Timur yang telah melayani peneliti selama melakukan penelusuran sumber pustaka;
4. Para pegawai di badan Arsip Nasional dan Kota Surabaya;
5. Para kolega yang telah membantu melakukan penelitian.

Saya berharap, hasil penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Surabaya, Akhir Oktober 2003

Tim Peneliti



## BAB I

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dimotivasi paling tidak oleh dua hal. *Pertama*, kehadiran Jepang di Indonesia yang sangat singkat (hanya lebih kurang empat puluh bulan, dari Maret 1942 hingga Agustus 1945) membawa berbagai perubahan, baik di bidang sosial, politik, maupun pemerintahan. Politik Jepang terhadap Islam dan para pemimpinnya misalnya (yang juga merupakan salah satu perbedaan utama dari politik Belanda) sangat penting pengaruhnya bagi kehidupan politik Indonesia.

Pada mulanya, seperti halnya Belanda, Jepang juga tidak ingin memberi kebebasan yang murni bagi kehidupan politik Islam. Seperti Belanda, Jepang dihantui oleh ketakutan terhadap semangat pemberontakan di bawah pimpinan Islam, oleh hantu "Perang Sabil" dan di atas segalanya oleh kenyataan bahwa pusat kesetiaan Islam terletak di Timur Tengah. Akan tetapi, bilamana Belanda, meskipun adanya politik tidak campur tangan dalam bidang agama, berusaha untuk mengepung pengaruh Islam dalam masyarakat Indonesia, Jepang tidak ragu-ragu meningkatkan posisi agama Islam dan memberikan prestise sosial pada Islam dan pemimpinnya.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 240-241.

Jika dalam masa pemerintahan kolonial Belanda, kaum priyayi yang dijadikan sebagai *cornerstone* dalam mengelola administrasi pemerintahannya, maka Jepang menampilkan kaum ulama. Dengan demikian, sejak pendudukan Jepang, golongan ulama tidak lagi merupakan pihak yang tersingkir, tetapi ikut berperan serta dalam politik dan administrasi pemerintahan.<sup>2</sup>

Selain itu, dalam masa pendudukan Jepang, konflik yang sejak lama terjadi antara kyai dan penghulu berangsur-angsur reda. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Jepang yang menarik kyai ikut berperan serta dalam administrasi pemerintahan, khususnya di *Shumubu* (Departemen Agama) dan di *Shumuka* (Kantor Departemen Agama Tingkat Karesidenan). Untuk itu, dapat dikatakan bahwa politik Jepang bertolak belakang dengan Belanda. Belanda berpegang teguh pada kemampuan politik *divide et empera*, sedangkan Jepang justru mempersatukan organisasi-organisasi muslim dalam satu organisasi yang menyeluruh.<sup>3</sup>

Lebih jauh, Jepang pulalah yang memberi kesempatan bagi golongan santri mendapat latihan kemiliteran, baik di pasukan Hizbullah maupun di PETA (Pembela Tanah Air). Hal inilah yang telah memberi kesempatan bagi

---

<sup>2</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis* (Jakarta: PLP2M, 1984), hlm. 94.

<sup>3</sup> Kobayshi Yasuko, "Kyai and Japanese Military" dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 4, No. 3, Tahun 1997 hlm. 79-80; Harry J. Benda, *op.cit.*, hlm. 166-168; Nourouzzaman Shiddiqi, *op.cit.*, hlm. 95.



pihak santri untuk ikut berperan aktif dalam perang kemerdekaan Indonesia.<sup>4</sup> Kedua, kajian-kajian yang memfokuskan pada pendudukan Jepang dan pengaruhnya pada masyarakat masih sangat terbatas. Berbeda dengan perhatian yang diberikan terhadap periode kolonial Belanda, hanya beberapa sarjana yang memberikan perhatian dan mencurahkan minatnya untuk mengkaji periode pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya dan masalah yang berkaitan dengan Islam khususnya.

Keterbatasan tersebut semakin tampak ketika ingin mengetahui berbagai kebijakan Jepang terhadap Islam di Jawa Timur, padahal *Nahdatul Ulama* (NU) yang menjadi salah satu organisasi Islam yang ingin didekati oleh Jepang berdiri dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di Jawa Timur. Bahkan *Majelis Syura Muslimin Indonesia* (Masyumi) yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi muslim dan berdiri atas prakarsa Jepang dipimpin pertama kali oleh orang NU, yakni K.H. Hasjim Asj'ari. Dengan kata lain, belum ada kajian yang khusus dan mendalam tentang berbagai kebijakan Jepang terhadap Islam di Jawa Timur.

## 1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada beberapa persoalan, yakni:

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 95; Harry J. Benda, *op.cit.*, hlm. 173.

1. Kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa-masa akhir penjajahannya;
2. Bagaimana proses masuknya Jepang di Jawa Timur dan re-Orientasi Politik yang dilakukannya;
3. Upaya apa yang dilakukan Jepang untuk merebut simpati masyarakat.

Dari empat rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini penting untuk dilakukan agar diperoleh suatu analisis yang mendalam tentang berbagai hal menyangkut Jepang dan Islam di Jawa Timur. Berdasarkan hal itu, hasil studi ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang benar dan proporsional tentang apa dan bagaimana hubungan Jepang dan Islam di Jawa Timur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam konteks yang lebih luas baik tema maupun spasial, penelitian tentang Jepang di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa sarjana. Pada tahun 1949 misalnya, A.J. Piekaar menulis buku, *Atjeh en de oorlog met Japan*.<sup>1</sup> Buku yang ditulis dalam bahasa Belanda ini membahas tentang pendudukan Jepang di Aceh. Pada tahun 1955, M.A. Azis menulis tentang *Japan's Colonialism and Indonesia*,<sup>2</sup> sedangkan pada tahun 1958, Harry Jindrich Benda menulis disertasi yang berjudul *The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam Under the Japanese Occupation*.<sup>3</sup> Disertasi Benda yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Jaya menjadi rujukan banyak peneliti untuk melihat Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

Namun demikian, buku ini tidak berbicara secara detail tentang kebijakan-kebijakan Jepang terhadap Islam di daerah-daerah seperti Jawa Timur. Selain itu, Benedict R.O.G. Anderson menulis dua karya, masing-masing: *Some Aspects of Indonesia under the Japanese Occupation: 1944-1945*<sup>4</sup>, dan *Java in a Time of*

---

<sup>1</sup> A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* (s'Gravenhage: W.van Hoeve, 1949).

<sup>2</sup> M. A. Azis, *Japan's Kolonialism and Indonesia* (The Hague Martinus Nijhoff, 1955)

<sup>3</sup> Harry Jindricch Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

<sup>4</sup> Benedict R.O.G. Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics the Japanese Occupation 1944-1945* (Ithaca New York: Cornell University Press, 1961).

*Revolution. Occupation and Resistance*, 1944-1946<sup>5</sup>. Pada tahun 1971, B.J. Boland juga menulis tentang Jepang di Indonesia, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*<sup>6</sup>. Akan tetapi, publikasi terbaru tentang pendudukan Jepang di Indonesia adalah disertasi Aiko Kurasawa yang berjudul *Mobilization and Control: A Study of Social Change in Rural Java, 1942-1945*<sup>7</sup> dan artikel Kobayashi Yasuko, yang berjudul *Kyai and Japanese Military* dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 4, No. 3, 1997.

Dari berbagai penelitian di atas, hanya ada tiga kajian yang memfokuskan tentang Islam pada masa pendudukan Jepang. Akan tetapi, tiga karya tersebut tidak menjadikan Jawa Timur sebagai pokok kajian. Oleh karena itu, studi ini dapat dikatakan sebagai studi pertama yang berusaha mengkaji berbagai kebijakan Jepang terhadap Islam di Jawa Timur.

## 2.2. Landasan Teori

Penguasaan pemerintah pendudukan Jepang terhadap Islam di Jawa Timur, akan dianalisis dengan menggunakan teori hegemoni yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, kekuasaan yang dijalankan oleh alat-alat negara dengan jeli dan jitu dapat membuat rakyat yang ada dalam

<sup>5</sup> Benedict R.O.G. Anderson, *Java in a Time Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca New York: Cornell University Press, 1972).

<sup>6</sup> Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971).

<sup>7</sup> Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol* (Jakarta: Gramedia, 1987).



kekuasaannya merasa tenteram dan aman dalam penindasannya. Dengan kata lain, hegemoni adalah suatu sistem pemerintahan yang dengan sadar membuat kekuasaan berwajah tidak menakutkan, sebaliknya tampak alim dan familiar di mata rakyatnya. Gerakan hegemonisasi itulah yang membuat rakyat, baik yang duduk dalam stratifikasi sosial yang tinggi maupun yang rendah terbius dan tenggelam dalam rasa aman. Hegemoni tidak tampil dalam wajah seram, namun halus memikat siapa saja yang ada di sekitarnya, namun akhirnya mereka takluk mutlak dalam tangan kekuasaan.

Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya dengan melalui mekanisme kelembagaan seperti sekolah, gereja, dan sebagainya yang merupakan sarana kelompok yang berkuasa<sup>8</sup>. Selain itu, hegemoni juga merupakan sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya: melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu, hegemoni merupakan upaya untuk menggiring agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Cara penaklukkan masyarakat secara keseluruhan dilakukan lewat penanaman

---

<sup>8</sup> Rifan Ansori, "Diskursus Kekuasaan Negara Terhadap Kebebasan Beragama: Studi Tentang Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia". Skripsi tidak diterbitkan pada Universitas Airlangga, 2001, hlm. 13.

norma, nilai serta budaya secara ideologis oleh kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya<sup>9</sup>.

Berkaitan dengan pendudukan Jepang di Jawa Timur, mekanisme penguasaan seperti yang disampaikan oleh Gramsci akan dilihat, khususnya untuk mengetahui upaya yang dilakukan Jepang untuk “menjinakkan” umat Islam yang memiliki semangat Perang Sabil terhadap kolonialisme.

---

<sup>9</sup> Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 120.



## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Kebijakan Jepang Terhadap Islam di Jawa Timur ini, memiliki beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui politik Islam yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa-masa akhir kekuasaannya;
2. Untuk mengetahui proses masuknya Jepang dan kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan pada masa pendudukannya di Jawa Timur;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam rangka merebut simpati masyarakat muslim.

#### 3.2 Kontribusi Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi minimal pada dua aspek.

1. Kontribusi pada perkembangan ilmu sejarah. Dengan kata lain, kajian ini diharapkan lebih memperluas horizon penelitian sejarah, khususnya yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah asing terhadap Islam di Jawa Timur;
2. Penelitian ini diharapkan juga memberikan pemahaman yang baik dan lebih proporsional tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang terhadap Islam di Jawa Timur.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4. 1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang memiliki pengalaman langsung dengan masa pendudukan Jepang di Jawa Timur. Data primer lain yang akan dikumpulkan adalah sejumlah arsip yang berasal dari Arsip Nasional Jakarta, Arsip Daerah Jawa Timur dan Kota Surabaya. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang sudah diterbitkan maupun bahan sezaman lainnya.

#### 4. 2 Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik melalui wawancara maupun lewat pengumpulan dari berbagai instansi, selanjutnya akan diklasifikasi berdasarkan pemilahan tujuan-tujuan penelitian. Data yang telah diklasifikasi selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan diharapkan akan menghasilkan pembahasan yang bersifat deskriptif-analitis.

#### 4. 3 Rancangan (Desain) Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *historis (historical research)*. Penelitian historis sangat bermanfaat untuk memahami perubahan dan pergeseran berbagai

kebijakan pemerintah pendudukan Jepang, baik kebijakan sosial maupun politik. Dengan kata lain, dari jenis penelitian historis akan diperoleh pengetahuan tentang pergeseran berbagai kebijakan Jepang terhadap umat Islam di Jawa Timur. Namun demikian, penelitian jenis ini umumnya lebih berkonsentrasi pada urutan kronologis atau diakronis, sedangkan aspek-aspek yang sifatnya sinkronis kurang mendalam. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut (diakronis maupun sinkronis) akan diusahakan secara lebih berimbang dan saling melengkapi.

Selanjutnya, penelitian akan dilakukan berdasarkan tahap-tahap berikut ini:

### **Tahap I**

Penelitian akan dimulai dengan peninjauan ulang (selama satu bulan) berbagai kajian yang sudah diterbitkan mengenai segi kontemporer dari Jawa Timur, khususnya yang berhubungan dengan pendudukan Jepang.

### **Tahap II**

Peneliti utama dibantu anggota peneliti melakukan penelitian di kantor arsip dan perpustakaan, baik di Jakarta maupun di Surabaya.

### **Tahap III**

Setelah informasi dikumpulkan melalui tahap I dan II, tim peneliti mulai

melakukan penelitian lapangan. Tim akan melakukan wawancara dengan orang yang mengalami masa pendudukan Jepang di Jawa Timur.

#### **Tahap IV**

Pada tahap ini, semua data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasi dan dianalisa secara mendalam. Selanjutnya akan dilaksanakan penyusunan laporan sementara. Laporan sedapat mungkin didiskusikan secara intern, sehingga dapat memberikan input-input untuk menyusun laporan akhir.

#### **Tahap V**

Penulisan dan pengiriman laporan akhir serta seminar di Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Kebijakan Terhadap Islam pada Masa-masa Akhir Penjajahan

##### Belanda

Dekade pertama sampai ketiga abad ke-20 dapat dikatakan sebagai masa-masa yang menyulitkan pemerintah kolonial Belanda. Dalam masa ini muncul elite-elite baru – sebagian dari akibat politik etis - dengan kesadaran yang baru. Dalam masa inilah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi pergerakan baik yang bercorak nasionalis maupun keagamaan. Hal ini sangat dirasakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai ancaman yang sangat serius terhadap eksistensi kekuasaannya di Hindia Belanda.

Dengan kesadaran itu, pemerintah kolonial melakukan pengawasan sedemikian rupa dan larangan-larangan terhadap pers maupun gerakan-gerakan lainnya demikian keras, sehingga banyak orang beranggapan bahwa sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda menjadi suatu sisten diktator yang terselubung<sup>10</sup>.

##### 5.1.1 Pilgrims Ordonantie (Ordonansi Haji)

Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu juga dirasakan sebagai ancaman yang tidak kalah seriusnya. Kekhawatiran tersebut, khususnya terhadap gerakan pembaruan Islam

---

<sup>10</sup> R.Z. Leirissa, *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-19450* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 69.

diperdalam oleh perkembangan-perkembangan di Asia Barat (Timur Tengah) yang membawa pengaruh terhadap kejadian-kejadian di dalam negeri. Bayangan pan-Islam yang menakutkan para pengambil keputusan Belanda sebelum kedatangan Snouck Hurgronje di Hindia Belanda, belum sama sekali berhenti mengganggu pikiran penguasa meskipun dia telah berusaha keras menghilangkannya<sup>11</sup>.

Seperti yang diketahui penaklukan Mekkah oleh Ibnu Saud membawa pengaruh yang mendalam terhadap kaum pembaharu di Hindia Belanda baik bagi Sarekat Islam maupun Muhammadiyah. Pada saat yang sama, dia membangkitkan momok Wahhabisme di kalangan Islam ortodoks dan memberi angin kepada permusuhan terbuka antara kedua golongan di dalam kubu Islam. Memihaknya Belanda kepada pemimpin ortodoks pada tahun-tahun pertama dengan demikian sebagian dapat dijelaskan dengan bangkitnya ketakutan terhadap pan-Islam, yang berdasarkan atas alasan dogmatik ditolak dan ditentang oleh ulama ortodoks<sup>12</sup>.

Mekkah sebagai kota suci umat Islam menjadi magnet yang sangat kuat bagi orang-orang Islam termasuk umat Islam di Hindia Belanda untuk mengunjunginya. Dengan ditunjang dengan keadaan ekonomi yang baik di tanah jajahan dan hubungan pelayaran yang dipermudah menyebabkan jumlah

---

<sup>11</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 99.

<sup>12</sup> *Ibid.*



jamaah haji dari tahun ke tahun meningkat. Jumlah ini mengalami puncaknya pada tahun 1927 dengan 52.410 orang<sup>13</sup>.

Kenyataan semakin banyaknya orang-orang dari Hindia Belanda yang melaksanakan ibadah haji membuat pemerintah kolonial takut bahwa orang-orang Islam fanatik akan melancarkan propaganda anti- Belanda dan membawa ajaran-ajaran yang tidak diinginkan ke Hindia Belanda. Ketakutan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang mengontrol ketat jumlah jamaah haji atau sering disebut sebagai "pilgrims ordonances"<sup>14</sup>.

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam urusan haji jelas menimbulkan perasaan tidak senang bagi pemimpin-pemimpin Islam di Hindia Belanda, karena bagaimanapun ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang telah mampu. Kongres ulama Nahdlatul Ulama tahun 1938 di Memes Jawa mengambil keputusan untuk meminta kepada pemerintah kolonial Belanda agar orang-orang Hindia Belanda yang ada di Mekkah dibebaskan dari pajak. Usaha yang sama telah dilakukan dan diperjuangkan sejak muktamar ke-22 di Malang dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dimana jamaah haji akan menderita bila harus mengeluarkan pajak haji<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> G.F. Pijper, "Politik Islam Pemerintah Belanda" dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta: Obor, 1987), hlm. 241.

<sup>14</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927, No. 286 dan 1932, No. 554.

<sup>15</sup> H.M. Sholeh Hayat, et.al., *Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan* (Surabaya: PWNJ Jatim, 1995), hlm. 28.

Selain kebijakan kontrol yang ketat, pihak Belanda juga menginginkan agar mereka yang sudah selesai menyelenggarakan ibadah haji langsung pulang ke kampung halamannya karena dikhawatirkan selama menetap di Mekkah telah diberi bekal ilmu perjuangan untuk melawan kaum penjajah dan memperjuangkan hak-hak bangsanya. Hal ini merupakan upaya Belanda untuk mencegah agar mereka yang pulang haji tidak menjadi tokoh politik dan tidak menjadikan agama sebagai basis gerakan politik<sup>16</sup>.

### 5.1.2 Ordonansi Guru

Aspek penting dari kehidupan Islam yang juga tidak lolos dari kontrol adalah pendidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya Ordonansi Guru tahun 1925<sup>17</sup>. Ordonansi ini merupakan penyempurnaan dari ordonansi yang telah dikeluarkan pada tahun 1905<sup>18</sup> dengan isi yang hampir sama berupa peraturan yang mewajibkan guru-guru pesantren, muballig, dan juru dakwah Muhammadiyah untuk membuat laporan tentang tujuan pembelajaran agama yang bukan keluarga dekatnya disertai dengan teks-teks yang dipakai dalam pelajaran tersebut.

Selain itu, ordonansi ini mengharuskan adanya izin tertulis dari bupati atau pejabat yang sama kedudukannya tentang pendidikan agama Islam.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>17</sup> *Staatsblad*, 1925, No. 219.

<sup>18</sup> *Staatsblad*, 1905, No. 550.

Seorang guru agama juga harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut bentuk tertentu yang harus dikirimkan secara periodik kepada kepala daerah yang bersangkutan. Bupati atau pejabat yang sama kedudukannya hendaklah mengawasi dan mencegah dan mengecek apakah guru agama tersebut bertindak sesuai dengan izin yang diberikan. Pejabat juga harus mengawasi anak-anak murid yang dimaksud yang berasal dari luar daerah guru tadi<sup>19</sup>.

Bagi sekolah-sekolah yang mempunyai organisasi yang baik ordonansi ini mudah dijalankan, tapi tidak demikian dengan sekolah-sekolah dan guru agama. Lembaga pendidikan seperti pesantren tidak memiliki administrasi yang baik, tidak mencatat nama dari seluruh santri ataupun staf pengajar mereka. Tambahan pula, banyak dari guru agama tersebut tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, sedangkan yang menguasai huruf latin umumnya tidak memiliki mesin tulis yang dapat dipakai membuat lembaran-lembaran daftar yang diperlukan untuk dikirimkan kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan<sup>20</sup>.

Campur tangan pemerintah di bidang naik haji dan pendidikan Islam jelas menyalahi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Snouch Hurgronje. Namun demikian, pemerintah merasa harus mengambil tindakan

---

<sup>19</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 194.

<sup>20</sup> *Ibid.*

pengawasan ini jangan sampai pelajaran-pelajaran yang diberikan di madrasah dan pesantren memiliki muatan-muatan politik.

Tidak pelak lagi, ordonansi ini menyulut berbagai protes dari berbagai ulama dan organisasi keagamaan pada waktu itu. Pada tanggal 21 Mei 1940 misalnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengirim surat kepada pemerintah kolonial Belanda agar jangan memungut belasting (pajak) kepada madrasah NU. Sebulan setelah surat tersebut dikirim, pada tanggal 10 Juli 1940 K. H. Machfudz Shidiq dan A. Diyar selaku *Hoofbestuur* NU mengajukan lagi surat kepada gubernur jendral di Betawi. Adapun isi surat tersebut adalah:

“Meningat bahwa Indonesia adalah Darul Islam, maka ulama NU mohon ditiadakannya Guru Ordonansi tahun 1925. Memberikan kebebasan kepada mubalig-mubalig dan guru-guru agama Islama mengajarkan ilmu agamanya di dalam dan di luar atap, demikian juga menjalankan ibadah dan perintah agama. Akan menggunakan kas-kas masjid untuk maslahatnya agama Islam dan menghukum atas penghina agama Islam”<sup>21</sup>.

### 5.1.3 Kebijakan yang Semakin Menindas

Menjelang peralihan kekuasaan, keberadaan Belanda pada dekade ketiga Abad XX memasuki tahapan yang bersifat menindas karena disibukkan dengan usaha untuk mengatasi masa-masa yang sulit yang ditimbulkan oleh depresi ekonomi. Pada periode ini, Belanda benar-benar menguasai Hindia Belanda karena gubernur jenderal yang berkuasa pada waktu itu antara tahun 1931 dan

---

<sup>21</sup> H.M. Sholeh Hayat, et al., *op. cit.*, hlm. 34.

tahun 1936 adalah Bonifacius C. de Jonge menentang semua bentuk nasionalisme dan menekan peranan *volksraad*. Pemimpin-pemimpin politik yang beraliran dan bereaksi terlalu keras ditangkap dan dipenjarakan.<sup>22</sup> Di sisi lain antara para pemimpin politik memiliki perbedaan ideologi yang bertabrakan, seperti nasionalisme sekuler dan Islam.

Dalam intern Islam sendiri terdapat pertikaian-pertikaian antara Islam kelompok tradisional dan Islam kelompok modern. Keadaan yang paradoks dalam Islam tersebut baru disadari oleh kedua kelompok akan keterkucilannya dari perkembangan-perkembangan politik lokal maupun internasional dan adanya kesadaran bahwa mereka menghadapi secara bersama-sama rezim kolonial yang semakin bersifat memusuhi. Maka, pada bulan September 1937 pemimpin Nahdatul Ulama (tradisional) dan Muhammadiyah (modern) memprakarsai pembentukan Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI).<sup>23</sup> Meskipun organisasi ini secara eksplisit tidak bergerak dalam bidang politik, tetapi keberadaannya mampu melebur ideologi nasionalisme dan ideologi Islam yang berseberangan secara kaku. Anggota-anggota MIAI yang sebenarnya mempunyai sifat untuk berpolitik serta banyak terlibat dalam urusan soal

<sup>22</sup> Contoh untuk kasus ini adalah Soekarno yang diajukan ke pengadilan umum di Bandung tahun 1930 yang dijatuhi hukuman empat tahun penjara di penjara Sukamiskin dengan tuduhan membahayakan ketertiban umum. Tahun 1933 ditangkap dan diasingkan di Flores, pada bulan Februari 1934, Hatta, Sjahrir, dan pemimpin yang lain diasingkan di Boven Digul.

<sup>23</sup> MIAI didirikan pada tanggal 18-21 September 1937, organisasi yang baru ini mampu menyedot organisasi yang berideologi Islam untuk bersatu dan menghadapi politik Belanda yang merugikan secara bersama-sama, seperti: penolakan terhadap undang-undang baru mengenai perkawinan, pembagian warisan, dan kewajiban militer bagi umat Islam. Lihat, Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangkitan Islam: Biografi K.H. Hasyim Asy'ary* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 89-94; Deliar Noer, *op. cit.*, hlm. 265-266

politik, terutama tahun-tahun terakhir menjelang jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang,<sup>24</sup> maka ketika ada tuntutan dari GAPI supaya Indonesia berparlemen didukung sepenuhnya oleh MIAI.<sup>25</sup>

Belanda tidak mengalami kepanikan yang berarti terhadap reaksi yang ditimbulkan karena tuntutan GAPI maupun MIAI. Jika pemerintah masih memegang tanggung jawab atas Indonesia, maka tidak akan ada pemerintahan parlemen Indonesia. Sebaliknya, pemerintah Hindia Belanda dihantui oleh situasi politik internasional. Jepang secara terang-terangan mendesak agar pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan Jepang memasuki Indonesia. Reaksi yang diberikan justru memperkuat dan memperbesar militernya. Belanda juga ingin membentuk suatu milisi yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang jumlahnya sampai 6000 orang. Bagi kaum nasionalis, Belanda seharusnya tidak membentuk milisi tanpa terlebih dahulu menerapkan parlemen secara penuh. Akhirnya usulan tentang milisi tersebut disahkan juga karena mendapat dukungan kuat dari orang-orang Belanda.

Tahun-tahun sebelumnya Belanda sudah mempersiapkan diri untuk menanggulangi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Setelah pertengahan tahun 1938 pengawasan diperketat atas pergerakan-pergerakan yang ada dan memperlakukan hukum dalam hal pernyataan pendapat dan berkumpul secara

---

<sup>24</sup> Deliar Noer, *ibid.*, hlm.265

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 292





lebih keras. Hal ini mengakibatkan hubungan orang-orang Belanda dengan orang-orang Indonesia semakin memburuk ketika tumbuhnya chauvinisme Belanda dan berkembangnya ketakutan akan mata-mata. Untuk kota Surabaya pihak Belanda mulai menerapkan larangan-larangan terhadap konsentrasi massa, seperti olah raga kampung dan perlombaan burung merpati dengan alasan untuk mencegah disebarkannya berita buruk.<sup>26</sup>

## 5.2 Pendudukan Jepang & re-Orientasi Kebijakan Terhadap Islam di Jawa Timur

“Saya sangat terharu dan kasihan melihat bagaimana letnan jendral itu mengeluarkan pulpen dari saku jas seragamnya dan dengan air mata yang berlinang menandatangani dokumen-dokumen itu. Waktu itu pukul 13.30 waktu Jawa. Selanjutnya saya bertanya apakah dia masih menginginkan sesuatu dari tentara Jepang dan dia berkata pada waktu itu, ‘Kami ingin sekali merawat orang-orang yang luka-luka dan gugur yang ditinggalkan di front dan secepat mungkin menguburkan mayat-mayat’ yang saya jawab, ‘saya sependapat sekali dengan tuan ! Biarlah kedua-dua tentara merawat anggota-anggota mereka yang luka-luka bersama-sama, sementara yang gugur, yang mati untuk tanah airnya secepatnya dikuburkan!’”

*J.C. Bijkerk, Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda), Jakarta: Djambatan, 1988, hlm. 332.*

---

<sup>26</sup> William H. Frederick, op. cit., *Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)* (Jakarta: Gramedia, 1989) hlm. 5

Kutipan di atas adalah sebagian dari buku harian Jenderal (purnawirawan) Hitoshi Imamura yang menceritakan percakapannya dengan Letnan Jenderal Ter Poorten di markas besar Imamura di Kalijati dekat Bandung, 8 Maret 1942 berkaitan dengan penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang. Perundingan tersebut mengakhiri perang antara Jepang dengan Belanda yang telah dimulai sejak hari Jumat 27 Februari 2602 (1942)<sup>27</sup>.

Dalam upaya menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda, pihak Jepang membaginya menjadi tiga bagian. *Pertama*, wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya dibawah tentara Angkatan darat ke-17 (Rikugun) dan berpusat di Singapura dan Saigon. *Kedua*, wilayah Jawa dan Madura dibawah tentara Angkatan Darat ke-25 (Rikugun) dan berpusat di Jakarta, dan ketiga, wilayah Kalimantan, Bali ke Timur, dan Sulawesi ke Timur di bawah Angkatan Laut (Kaigun) dan berpusat di Makassar.

### **5.2.1 Masuknya Jepang dan re-Orientasi Kebijakan Terhadap Islam di Jawa Timur**

Masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya sebagai kota besarnya merupakan salah satu kota pertama yang memperhitungkan secara serius kedatangan perang. Pemerintah Hindia Belanda membentuk korps sipil pertahanan udara sejak tahun 1937, serta mulai melembagakannya dalam peringatan-peringatan. Ketika negeri Belanda dapat dijatuhkan oleh Jerman

---

<sup>27</sup> *Djawa Baroe*, No. 5, hlm. 3.

yang merupakan kelompok Jepang dan Italia pada bulan Mei 1940, kegelisahan akan serangan yang akan dilancarkan oleh Jepang mulai menampak dengan pemadaman lampu, serta munculnya usul-usul yang secara serius menjadi pembicaraan tentang pendirian kantor penerangan berbahasa Indonesia dan penempatan radio umum di setiap kampung.<sup>28</sup>

Sikap-sikap keseharian antara orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia mulai memburuk, jaksa melarang penggunaan kata Indonesia, serta proyek-proyek yang dilakukan bukan memenuhi fasilitas kota, akan tetapi usaha-usaha pertahanan dengan jalan melakukan penggalian-penggalian tanah untuk berlindung dari serangan bom.<sup>29</sup> Sejak pertengahan tahun 1940, Belanda semakin bingung dan perhatiannya tersita oleh peperangan yang secara tepat belum diketahui.

Menjelang awal tahun 1941, Surabaya mulai diambang keruntuhan. Pengungsian masyarakat Surabaya terjadi secara besar-besaran dan terjadi secara terus-menerus ke wilayah pedalaman dan segera diikuti dengan gerak yang berkebalikan yang dilakukan oleh para pangreh praja dan orang-orang Belanda menuju ke kota. Gelombang perpindahan masyarakat awam ini akar permasalahannya adalah ketidakstabilan karena pokok perhatian pemerintah kota hanya kepada persiapan-persiapan militer, sehingga timbul kecemasan-

---

<sup>28</sup> *Soeara Oemoem*, 24 - 8 - 1941.

<sup>29</sup> *Soeara Oemoem*, 22 - 1 - 1941.

kecemasan akan terjadinya perang yang besar di Surabaya.

Sampai bulan Januari hingga Februari 1942 perang yang sebelumnya masih tampak jauh dan samar-samar bagi masyarakat umum Surabaya meskipun indikasi ke arah perang itu ada, kini tiba-tiba datang dan jelas menjadi kenyataan saat pasukan Jepang melakukan pengeboman pertama dari lebih enam puluh kali di atas kota Surabaya selama kurang dari satu bulan<sup>30</sup>.

Situasi perang sudah benar-benar terjadi antara serdadu Belanda dengan pasukan Jepang. Dalam suasana perang Jepang lebih cerdik dan mempunyai semangat dengan membuat konfigurasi nyanyian yang dilakukan secara kompak, berbarengan, dan saling sahut-menyahut untuk menimbulkan kesan sebagai pasukan yang banyak supaya dapat didengar oleh serdadu Belanda. Dengan demikian secara mental serdadu Belanda dapat dikalahkan. Dalam hitungan jam serbuan pertama dari wilayah selatan untuk merebut daerah Wonokromo dapat dilakukan. Dalam perang ini keterlibatan pribumi hanya sebagai penonton<sup>31</sup>.

Keadaan menjadi kacau, pada tanggal 26 Februari 1942 hubungan

---

<sup>30</sup>William Frederick, *op. cit.*, hlm. 110. Kedatangan orang-orang Jepang di Jawa Timur, khususnya Surabaya telah berlangsung sejak akhir zaman Meiji (1867-1912) dengan profesi sebagai pedagang. Di Surabaya pula untuk pertama kalinya didirikan sekolah Jepang atas inisiatif Asosiasi Orang Jepang pada tahun 1925. Pada tanggal 18 Desember 1938 mereka juga membentuk Surabaya Nihon-jin Seinen-kai (Asosiasi Pemuda Jepang) dengan jumlah anggota 230 orang, lihat Ken' Ichi Goto, *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), hlm. 187; 203; Mattulada, *Pedagang dan Sempoa (Suatu Analisis Kultural "Perasaan Kepribadian" Orang Jepang* (Ujungpandang: LEPHAS Unhas, 1979), hlm. 127.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Imam Supadi (anggota Seinendan pada Masa Jepang), 11 September 2003.

telepon dengan ibukota terputus, kehidupan keseharian yang semula normal berhenti, sekolah-sekolah ditutup, bahan-bahan pokok dan uang disembunyikan, persediaan bahan makanan tidak bisa diharapkan lagi, pelayan serta para pekerja kasar menghilang dari tempat kerja, dan peraturan keluar rumah diabaikan karena orang mencari selamat. Puluhan ribu pengungsi memenuhi terus bergerak ke arah selatan seiring berkobarnya secara besar Perang Laut Jawa di perairan kota Surabaya. Dalam situasi ketegangan ini jaksa agung memerintahkan kepada dinas intelejen politik untuk memusnahkan hasil-hasil catatannya.

Sebagian kecil penduduk Surabaya memunculkan gelombang kekerasan dan perampokan terhadap toko-toko, kantor-kantor yang ditinggalkan dan sarana-sarana umum dengan memanfaatkan situasi. Sementara pangreh praja hampir tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya sebagai penonton, karena mereka menunjukkan sikapnya ini adalah cara untuk menyalurkan kebenciannya terhadap pemerintah jajahan. Tindakan-tindakan ini hanya sebagai tindakan yang tidak direncanakan oleh penduduk setempat. Motivasinya hanya karena situasi yang tak menentu dan beragamnya ketegangan.

Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 ketegangan dan kekisruhan di masyarakat dan perang sudah berakhir. Sekelompok kecil orang Belanda termasuk Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya bertemu dengan

komandan Divisi ke-48 Angkatan Darat Jepang di Sidoarjo. Para pejabat Belanda melakukan hormat kepada para perwira Jepang. Sejumlah tentara Jepang diberikan kepada para pejabat Belanda untuk dibawa ke kota. Ketika pasukan Jepang berbaris memasuki kota Surabaya, ada semacam sambutan terhadap pasukan yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya. Sementara sebagian orang-orang Belanda yang ada tetap di dalam rumah dan tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa ini.<sup>32</sup>

Perubahan yang tampak jelas dari pergantian kekuasaan adalah perubahan kebijakan. Penguasa baru secara serta merta mengubah tatanan yang semula sudah jadi kemudian diganti atau disesuaikan dengan selera penguasa yang memegang otoritas penuh. Masa pendudukan Jepang bukan hanya melanjutkan kebijakan yang telah digariskan oleh Belanda karena berbagai sebab Belanda dapat diusir dari wilayah yang dikendalikan selama sekian puluh tahun.

Pada waktu Jepang berkuasa telah memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan yang luar biasa yang mengarah pada perubahan status terutama semakin mengarah kepada revolusi Indonesia. Meskipun sangat terasa sekali bahwa seluruh rakyat dipolitisasi secara sengaja untuk selalu tunduk dan patuh kepada Jepang, sehingga rezim kolonial ini bersifat menindas dan

---

<sup>32</sup>William Frederick, *op. cit.*, hlm. 115.



merusak.

Ada dua prioritas kebijakan terhadap rakyat pada masa transisi kekuasaan oleh Jepang yang telah memegang suatu peran yang berarti: menghapus pengaruh Barat di kalangan rakyat dan memobilisasi rakyat demi kemenangan Jepang.<sup>33</sup> Untuk memulai dua prioritas utama tersebut secara cepat Jepang mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda dengan memecat dan menggiring semua personil Belanda, Indo, dan orang-orang yang dicurigai Jepang untuk dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi, dan sebagai penggantinya diambil dari personil Jepang yang dibantu oleh pribumi untuk mengisi kekurangannya. Kesempatan ini diberikan kepada pemimpin-pemimpin nasional untuk tampil di tengah-tengah masyarakat secara resmi.

Pada tahun-tahun permulaan pendudukannya, Jepang memasang para pemimpin nasional dan pemimpin agama pada organisasi kemasyarakatan.<sup>34</sup> Untuk menghilangkan pengaruh Barat, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, sebaliknya menganjurkan pemakaian bahasa Jepang, patung-patung Eropa diruntuhkan, jalan-jalan diberi nama baru, dan pengenalan kalender Jepang untuk tujuan-tujuan resmi.

---

<sup>33</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 300.

<sup>34</sup> P.J. Suwarno, *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia: Dahulu dan Sekarang* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1990), hlm. 67

Prioritas yang lain berlawanan dengan kebijakan yang diterapkan Belanda yang cenderung memaksakan suatu ketenangan yang tertib, sedangkan Jepang memutuskan berkuasa melalui mobilisasi dengan semakin meningkatnya kesadaran perang melawan sekutu belum dimenangkan secara total.<sup>35</sup> Jalan yang ditempuh adalah semakin terbukanya kerjasama antara pihak Jepang dengan rakyat, seperti membentuk dan mengorganisir *Heiho* (pembantu tentara), *Keibodan* (pembantu polisi), *Seinendan* (barisan pemuda dan pelajar), dan yang termasuk menarik adalah menempatkan ulama sebagai pemimpin formal dan informal. Ulama adalah alat yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat terutama di pedesaan. Maka, Jepang pun hendak memanfaatkan ulama sebagai instrumen dalam menyebarkan tradisi Jepang di pedesaan.<sup>36</sup>

### 5.2.2 Penangkapan Tokoh Islam

Kondisi ketika memulai berkuasa, Jepang berhasil menciptakan rasa perdamaian di antara para pemimpin keagamaan. Strategi ini bersifat umum dan menyeluruh dengan cara menarik simpati. Justru persoalan yang dihadapi Jepang secara nyata adalah permasalahan penataan ulang prasarana yang rusak

<sup>35</sup> Seperti pada Bulan Mei 1942 pertempuran di Laut Koral untuk menyerang Australia terhenti, demikian juga serangan terhadap Hawaii. Pada bulan Agustus 1942 pasukan Amerika Serikat mendarat di Guadalcanal (Kep. Solomon) dan enam bulan kemudian pasukan Jepang dapat dikalahkan dengan menderita kerugian.

<sup>36</sup> Menurut Abu Hanifah, ada dua front jenis tipe pemimpin pada masa Jepang. Yang disebutkan ini adalah front pertama yang memungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak Jepang dan front yang lain (kedua) bekerja di bawah tanah.



akibat perang, membenahi birokrasi pemerintahan, mengendalikan inflasi, menangani secara keras para penimbun barang, dan adanya ketidakpastian hukum<sup>37</sup>.

Permasalahan teknis yang menumpuk di Surabaya ini ditambah lagi oleh pernyataan politis Letnan Jendral Imamura sebagai Panglima Pendudukan Jepang di Jawa, yang mengeluarkan dekrit melarang aktifitas politik bangsa Indonesia dalam bentuk apapun<sup>38</sup>.

Dekrit ini melarang setiap diskusi yang berhubungan dengan politik, dan secara tiba-tiba menghentikan semua aktivitas politik, pembicaraan politik, dan organisasi politik. Untuk aktivitas keorganisasian Jepang akan mengalihkan atau membentuk gerakan organisasi yang baru yang disponsori oleh Jepang. Dekrit ini berlaku setelah dua minggu Jepang memasuki Surabaya. Apabila seruan ini diabaikan, berarti tindakan seperti itu dianggap sebagai pembangkangan dan anti-Jepang. Pada tanggal 20 Mei 1942, Jepang mengeluarkan pengumuman agar Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), dua partai yang bergiat dalam lapangan politik menghentikan kegiatannya.

Jenis tindakan Jepang yang dilakukan di Surabaya setelah menerima penyerahan kekuasaan adalah berusaha mengetahui hambatan politis yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Jepang mulai melakukan pencatatan terhadap orang-

---

<sup>37</sup> William H. Frederick, *op. cit.*, hlm. 117.

<sup>38</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 142.

orang Indonesia yang memiliki keberanian membangkang. Pencatatan ini mengarah kepada kelompok-kelompok terdidik yang ada di Surabaya. Ada alasan yang jelas bagi Jepang untuk melakukan tindakan tersebut, yang pada pokoknya meningkatkan kewaspadaan kepada orang-orang tertentu atau kelompok pergerakan. Kelompok ini memiliki pemikiran dan tingkah laku yang telah terbentuk dalam suatu bingkai anti penjajahan sehingga nantinya akan berpotensi menimbulkan kesulitan<sup>39</sup>.

Sampai bulan Januari 1943 terbukti dilakukan penangkapan beberapa pemimpin yang dilakukan oleh polisi Jepang dengan mengambil tindakan yang sangat keras bagi siapa saja yang dicurigai. Beberapa pemimpin secara sengaja dipenjara untuk mengurangi pengaruh mereka. Para pemimpin seperti K. H. Hasyim Asy'ari dan K. H. Mahfudz Shiddiq ditangkap oleh tentara Jepang dan dipenjarakan selama empat bulan dan diperlakukan secara semena-mena dengan tuduhan yang dibuat-buat oleh Jepang, yang dinyatakan bahwa tokoh tersebut sebagai dalang kerusuhan di pabrik gula di Jombang<sup>40</sup>.

Alasan inilah yang bisa dibuat untuk menunjukkan tuduhan tersebut riil. Akan tetapi, kemungkinan yang benar adalah K. H. Hasyim Asy'ari menolak untuk *saikeirei*. Budaya Jepang yang dipaksakan kepada penduduk pribumi yang harus membungkukkan badan 90 derajat (semacam ruku' dalam shalat) setiap

---

<sup>39</sup> William Frederick, *op. cit.* hlm. 120.

<sup>40</sup> Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Bisma Satu, 1999), hlm. 118.

pagi ke arah kaisar Jepang Tenno Haika. Sebagian umat Islam memandang hal ini sebagai dosa karena identik dengan gerakan beribadah yang berarti pula menyembah seseorang yang termasuk dalam perbuatan syirik.<sup>41</sup>

Langkah Jepang yang mewajibkan *saikeirei* bagi seluruh rakyat adalah usaha yang bertujuan me-Nippon-kan seluruh rakyat melalui kebudayaan. Indonesia hendak dijadikan seperti Mansyuria, Korea, dan Formosa yang telah berhasil di-Nippon-kan. Kebudayaan Jepang disosialisasikan untuk menggantikan pengaruh kebudayaan Barat dan Arab (Islam). Untuk menghapus budaya Arab, Jepang tidak mengizinkan penggunaan bahasa Arab sebagai pengantar. Karena bahasa dan aksara Arab tidak boleh diajarkan di pesantren yang berarti pula pelarangan belajar Al-qur'an menurut pemahaman muslim. Hal ini mendapat tantangan dari pihak muslim dan akhirnya terpaksa dicabut oleh Jepang<sup>42</sup>.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk membebaskan kedua pemimpin adalah melakukan pertemuan dengan para konsul NU di Jakarta untuk membahas pembelaan dan menyepakati cara menghadapi pendudukan Jepang adalah dengan cara lunak dan diplomatis. Dengan cara ini akhirnya kedua pemimpin di Jawa Timur itu dibebaskan begitu saja setelah beberapa kali

---

<sup>41</sup> Lathiful Khuluq, *op. cit.*, hlm. 96.

<sup>42</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *op. cit.*, hlm. 105-108. Seperti yang dituturkan oleh Imam Supadi (anggota Seinendan pada Masa Jepang), Jepang tidak segan-segan menyakiti masyarakat yang tidak mau melakukan *saikeirei*. Wawancara, 11 September 2003.

dipindahkan dari penjara di Jombang, Mojokerto, dan Bubutan Surabaya, setelah Jepang mendapat tekanan simpatik dari beberapa ulama seperti K. H. Wahab Hasbullah dan K. H. Abdul Wahid Hasyim yang memprotes tindakan Jepang dan bersedia di penjara bersama K. H. Hasyim Asy'ari<sup>43</sup>.

Tidak lama setelah K. H. Hasyim Asy'ari dibebaskan dari penjara, budaya Jepang *saikerei* pun dikurangi penerapannya. Jepang mulai menyadari bahwa tindakannya sebagai kesalahan besar dan khawatir kehilangan simpati. Realitas yang dapat ditangkap dari situasi ini adalah orang-orang Islam di Jawa mempunyai pertahanan yang secara potensial lebih daripada priyayi, para pejabat pemerintahan, atau kaum nasionalis non-religius.

Harry J. Benda menyebutkan, *pertama*, mereka mempunyai keyakinan agama yang kuat. Orang-orang Islam mempunyai senjata moral dan dengan itu bisa mengemukakan prasyarat untuk bekerjasama, yaitu asal agama mereka dihormati. Sikap yang ditunjukkan Jepang terhadap prasyarat itu akan mampu menepiskan anggapan politik atau moral mengenai orang Jepang dari kelompok-kelompok lain. *Kedua*, sumber kekuatan Islam berada di dalam dukungan penganutnya yang luas. Para penguasa militer jelas menyadari pentingnya Islam sebagai suatu unsur yang kekuasaan utamanya di pedesaan. Pemerintah pendudukan Jepang secara cepat merencanakan kebijaksanaan yang

---

<sup>43</sup> Lathiful Khuluq, *op. cit.*, hlm. 97; Choirul Anam, *op. cit.*, hlm. 118-119.

ditujukan untuk memenangkan dukungan Islam. Kebijakan ini terutama ditujukan kepada masalah-masalah Islam di tingkat rakyat pedesaan (*grass roots*)<sup>44</sup>.

### 5.2.3 Usaha Merebut Simpati

Jepang yang memperhatikan besarnya jumlah muslim di Indonesia dan mengetahui dengan sungguh bagaimana posisi dan peranan ulama di pedesaan Indonesia yang jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada posisi dan peranan pemimpin yang hanya berasaskan nasionalisme, berusaha keras untuk menarik ulama ke pihaknya dan ulama jangan sampai memusuhinya<sup>45</sup>.

Jika selama masa penjajahan Belanda golongan muslim berada dalam kedudukan yang terbelakang, menjadi korban sikap dan tindakan yang berat sebelah, maka situasi tersebut dijungkir-balikkan Jepang yang memilih kaum santri daripada kaum priyayi. Kebijakan ini diambil karena Jepang mengharapkan peranan para pemimpin muslim dalam menggalang kekuatan massa rakyat untuk kepentingan perang mereka.

Kebijakan terhadap Islam yang diambil tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan jumlah penduduk muslim dan para pemimpin kharismatik-informal yang menjadikan orang/umat untuk hormat, tunduk, dan patuh kepada ulama. Oleh Jepang, para pemimpin Islam diarahkan untuk bekerja dibawah satu

<sup>44</sup> Harry J. benda, *op. cit.*, hlm. 138-139.

<sup>45</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *op. cit.*, hlm. 99.

kerangka yang telah dibangun. Cara yang ditempuh adalah mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk menciptakan suatu organisasi Islam sesuai kerangka tujuan politisnya dengan maksud merangkul semua orang Islam yang akan dijadikan sebagai salah satu bagian dalam gerakan propaganda. Jepang telah mempunyai maksud untuk mengarahkan keorganisasian berdasarkan bentukannya sehingga tahu persis organisasi tersebut. Maka, disini Jepang mempunyai maksud untuk mengubah Majelis Islam A'laa Indonesia.<sup>46</sup> Untuk mengubah MIAI dalam tempo cepat jelas tidak memungkinkan<sup>47</sup>.

Beberapa alasan untuk mengubah organisasi tersebut adalah *pertama*, keterlibatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam sudah menurun, maka suatu organisasi Islam yang kurang mendapat dukungan dari Muhammadiyah dan NU sudah tidak cukup ampuh untuk mencapai dan mempengaruhi massa. *Kedua*, MIAI bukan sebagai organisasi massa, ia hanya sebagai federasi dari berbagai organisasi yang memiliki karakter dan kebijaksanaan sendiri, sehingga sulit sebagai alat yang cocok untuk mencapai massa. *Ketiga*, MIAI masih menaruh perhatian terhadap masalah-masalah politik dan anti kolonialisme.<sup>48</sup>

Salah satu sebab mendasar yang membuat Jepang ingin membentuk satu

---

<sup>46</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 176.

<sup>47</sup> Akhirnya usaha mengubah MIAI baru berhasil dengan dibentuknya Masyumi oleh Jepang pada akhir tahun 1943.

<sup>48</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *op. cit.*, hlm. 112-115.



organisasi muslim yang menyeluruh, adalah untuk memperkuat sentimen kebangsaan dan agama dalam masyarakat guna kepentingan Jepang dan dapat meningkatkan pengawasan atas sentimen itu. Dengan demikian, satu organisasi Islam yang dibentuk oleh Jepang adalah sebagai wahana atau media untuk mencapai massa dalam mengintroduksi ide-ide dan cita-cita Jepang, juga bisa digunakan sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk diarahkan ke kehendak Jepang. Maka, kebijaksanaan Jepang yang tampak adalah *Nippon's Islamic Grass Roots Policy*, yaitu kebijaksanaan politik Jepang untuk kalangan rakyat jelata Islam dengan sasarannya adalah pesantren. Desa dan Ulama dijadikan sebagai basis dan pemimpin sipil terdepan yang mengatur masyarakatnya.<sup>49</sup>

MIAI yang merupakan federasi Islam yang dibentuk pada masa kolonial Belanda didekati melalui institusi Kantor Urusan Agama (*Shumubu*)<sup>50</sup> yang dibentuk oleh Jepang. Pada Permulaan bulan Mei 1942 *Shumubu* telah mengadakan kontak-kontak dengan para pejabat MIAI untuk mengidentifikasi dirinya dengan kepemimpinan Islam nasional dan untuk membangun hubungan langsung dengan pemimpin-pemimpin lokal umat Islam Indonesia. Pendekatan ini dipakai untuk menerapkan sistem tersebut di atas.

<sup>49</sup> Soleh Khayat, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>50</sup> *Shumubu* adalah Departemen Agama buatan Jepang yang dibentuk pada Bulan Maret 1942. Pembentukannya dibebankan kepada tiga orang Islam Jepang, yakni H. Abdul Muniam Inada, H. Abdul Hamid Ono, dan H. Muhammad Saleh Suzuki, dengan pimpinan pertamanya adalah Kolonel Horie.

Untuk keperluan itu para ulama didekati melalui penyelenggaraan penataran-penataran yang dikenal dengan nama *Latihan Kyai*. Latihan Kyai adalah penataran yang jangka waktunya lebih lama jika dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan biasa lainnya yang diselenggarakan oleh Jepang. Latihan Kyai dilaksanakan dalam rentang waktu selama 30 hari setiap angkatan.<sup>51</sup> Kelompok pertama diselenggarakan pada bulan Juni 1943 terdiri dari 60 kyai yang dipilih dari 17 karesidenan (*Shu*), Daerah Istimewa Jakarta dan empat kota besar (*Kochi*) di Jawa Tengah.

Latihan Kyai ini langsung berada dibawah perlindungan dan pengawasan *Shumubu*. Kelompok-kelompok selanjutnya menyusul pada bulan berikutnya.<sup>52</sup> Antara bulan Juli 1943 sampai Mei 1945, latihan ini telah berlangsung 17 kali di Jakarta.

Inilah permulaan dari kebijaksanaan terhadap rakyat Islam pedesaan dalam pemerintahan Jepang, sebagai tujuan akhir adalah untuk mempolitisir Islam di tingkat desa dalam usahanya untuk memperoleh sekutu yang bisa dipercayai dalam panggung politik Indonesia yang sama sekali baru.

---

<sup>51</sup> Nouorouzzaman Shiddiqi, *op. cit.*, hlm. 109.

<sup>52</sup> Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm. 167.

## BAB VI

### SIMPULAN

Dekade-dekade awal abad ke-20 merupakan masa-masa menyulitkan bagi pemerintah kolonial Belanda. Kesulitan tersebut disebabkan antara lain munculnya elite-elite baru, baik yang dipengaruhi oleh Barat maupun yang berorientasi Islam. Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan sejumlah kebijakan yang bertujuan mengontrol dan mengendalikan aktivitas masyarakat Hindia Belanda pada masa itu.

Kebijakan-kebijakan yang diambil antara lain dikeluarkannya ordonansi haji (*pilgrims ordonantie*) pada tahun 1927 dan 1932, ordonansi guru pada tahun 1905 dan 1925, serta penangkapan dan pengasingan sejumlah tokoh yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan mereka.

Betapapun pemerintah kolonial Belanda berusaha mempertahankan kekuasaannya, gelombang penyerbuan tentara pendudukan Jepang tidak mampu dibendungnya. Dengan linangan air mata Ter Poorten harus menandatangani dokumen penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang di Kalijati, dekat Bandung.

Wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya yang menjadi salah satu kota penting pada saat itu pun menjadi terget yang harus segera dikuasai. Setelah

diserang beberapa kali mulai Januari 1942, akhirnya pada 8 Maret 1942 Surabaya jatuh ke tangan Jepang.

Setelah berkuasa, Jepang memprioritaskan kebijakannya pada dua hal, yakni menghapus pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat demi kemenangannya. Kebijakan ini dilakukan baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara halus. Cara kekerasan antara lain dilakukan dengan menangkap dan memenjarakan tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya.

Dengan tuduhan sebagai dalang kerusuhan di pabrik gula Jombang misalnya, K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Mahfudz Shiddiq dipenjarakan selama empat bulan di Jombang, Mojokerto, dan Bubutan Surabaya. Selain itu, Jepang tidak segan-segan menyakiti mereka yang tidak mau melakukan *saikeirei*.

Menyadari kesalahannya yang menjadikan pemimpin Islam sebagai lawan, pihak Jepang mulai melakukan re-orientasi kebijakan dengan menarik para ulama ke dalam lingkaran kekuasaannya. Dengan kebijakan ini, Jepang berharap agar para pemimpin Islam dapat menggalang kekuatan massa rakyat untuk kepentingan perang mereka. Selain itu, Jepang tidak menghalang-halangi umat Islam yang hendak menjalankan ibadah seperti yang dilakukan Belanda dengan ordonansi hajinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O.G. *Java in a Time Revolution, Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca New York: Cornell University Press, 1972.
- *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation 1944-1945*. Ithaca New York: Cornell University Press, 1961.
- Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1971.
- Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Bisma Satu, 1999
- Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Djawa Baroe*, No. 5.
- Frederick, William. *Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Labirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Goto, Ken' Ichi. *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 1998
- H.M. Sholeh Hayat, et.al. *Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan*. Surabaya: PWNU Jatim, 1995.
- Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi dan Kontrol*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- M.A. Azis. *Japan's Colonialism and Indonesia*. The Hague Martinus Nijhoff, 1955.
- Mattulada. *Pedagang dan Sempoa (Suatu Analisis Kultural "Perasaan Kepribadian" Orang Jepang*. Ujungpandang: LEPHAS Unhas, 1979.
- Nourouzzaman Shiddiqi. *Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik Metodologis*. Yogyakarta: PLP2M, 1984.

Nezar Patria dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Piekar, A.J. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. S'Gravenhage: W. van Hoeve, 1949.

Pijfer, G.F. "Politik Islam Pemerintah Belanda" dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans, *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Obor, 1987.

P. J. Suwarno. *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia: Dahulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1990.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Rifan Ansori. "Diskursus Keuasaan Negara Terhadap Kebebasan Beragama: Studi Tentang Eksistensi Agama Konghucu di Indonesia". Skripsi tidak diterbitkan pada Universitas Airlangga, 2001.

R.Z. Leirissa. *Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-19450*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

*Soeara Oemoem*, 1941.

*Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, 1905 No. 550; 1925 No. 219; 1927, No. 286 dan 1932, No. 554.

Yasuko, Kobayashi. "Kyai and Japanese Military" dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 4, No. 3, tahun 1997.

Wawancara dengan Imam Supadi (anggota Seinendan pada Masa Jepang, tanggal 11 September 2003).

PAMERAN

1 JUN 2005